



BUDAYA KEPATUHAN

Di samping tata kelola perusahaan yang baik, aspek kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku juga merupakan aspek penting untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional dan sebagai bentuk kepatuhan Bank Mandiri sebagai warga korporasi yang baik. Ini semua mampu Bank Mandiri capai berkat peran serta aktif dari seluruh insan Mandiri, untuk memahami dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh ketentuan dan perundangan yang berlaku pada setiap fungsi operasional yang dijalankan. Bank Mandiri menyadari bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dapat berakibat teguran dari pihak regulator, mencemarkan reputasi baik perusahaan yang selama ini dibangun, dan pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan usaha Bank Mandiri di masa mendatang.

COMPLIANCE CULTURE

In addition to good corporate governance, compliance with laws and regulations is also an important aspect to ensure smooth operational activities and as a form of compliance with Bank Mandiri as a good corporate citizen. Bank Mandiri is able to achieve all of this thanks to the active participation of all of the Mandiri individuals, in understanding and taking responsibility in the implementation of all provisions and regulations that apply to every executed operational function. Bank Mandiri realizes that non-compliance with laws and regulations could result in a reprimand from the regulator, tarnish the reputation that the company that has built, and would ultimately have an impact on the sustainability of Bank Mandiri in the future.



PRINSIP KEPATUHAN BANK MANDIRI Bank Mandiri Compliance Principles

1. Bank selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan semua kegiatannya (*mandatory*).
2. Dewan Komisaris dan Direksi menjadi contoh teladan (*role model*) yang berlandaskan pada kejujuran dan integritas agar pelaksanaan kepatuhan menjadi Budaya Bank (*starts from the top*).
3. Seluruh jajaran Bank bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan budaya kepatuhan dalam setiap kegiatannya masing-masing.

1. The Bank always obeys laws and regulations and apply the prudential banking principles in conducting all its activities (*mandatory*).
2. Board of Commissioners and Board of Directors to be a role model based on honesty and integrity so that the implementation of compliance becomes Bank Culture (*starting from the top*).
3. The entire ranks of the Bank shall be fully responsible for implementing a compliance culture within each of their respective activities.

Hingga akhir tahun 2016, Bank Mandiri tidak pernah memberikan dukungan finansial kepada partai politik mana pun. Bank berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kontribusinya bagi perkembangan perekonomian negara. Hingga laporan keberlanjutan ini diterbitkan, Bank Mandiri juga tidak mendapatkan denda dan sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap Undang-undang dan peraturan yang berlaku. [G4-S06, G4-S08]

Until the end of 2016, Bank Mandiri never gave financial support to any political party. The Bank is committed to continue to increase its contribution to the economic development of the country. Until this sustainability report was published, the bank also did not receive any fines and non-monetary sanctions for non-compliance current to laws and regulations. [G4-S06, G4-S08]

PENGADAAN BERKELANJUTAN

[G4-12] [G4-EN32] [G4-LA14] [G4-HR10] [G4-DMA]

Komitmen Bank Mandiri terhadap keberlanjutan membuat Bank Mandiri menetapkan kebijakan pengadaan barang yang memenuhi aspek berkelanjutan, dalam hal ini pembelian dari pihak ketiga. Dalam

SUSTAINABLE PROCUREMENT

[G4-12] [G4-EN32] [G4-LA14] [G4-HR10] [G4-DMA]

Bank Mandiri's commitment to sustainability make the Bank set the procurement of goods that meet sustainable aspects, in this case the purchase of a third party. In practice, Bank Mandiri requires all vendors to



praktiknya, Bank Mandiri mengharuskan seluruh vendor memiliki kemampuan mengelola dan meminimalisir dampak lingkungan mereka masing-masing.

Semua pemasok Bank Mandiri harus mematuhi Kebijakan Pengadaan Bank Mandiri, yang meliputi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia yang berlaku, terutama dalam perlakuan sesuai hak asasi manusia, dan praktik kepegawaian.

Penilaian Pemasok Bank Mandiri telah dikembangkan sebagai sistem pemantauan untuk memastikan terdapatnya transparansi dalam proses pembelian. Penilaian Pemasok menghadirkan wawasan yang sangat bernilai mengenai daerah-daerah di mana perbaikan diperlukan, termasuk bagaimana Bank Mandiri dapat bekerja secara lebih efektif dengan pemasoknya dan menciptakan nilai tambah bersama-sama.

Pada akhir 2016, Bank Mandiri memiliki 995 pemasok terdaftar di Strategic Procurement Group yang hampir seluruhnya didominasi oleh pemasok nasional. Adapun untuk pemasok asing, Bank Mandiri hanya bermitra dengan pemasok asing untuk proyek terkait bidang IT, sementara untuk bidang-bidang lainnya dikerjakan hanya oleh pemasok nasional. Bila dilihat dari tabel di bawah ini, dari 179 pemasok bidang IT, 9 (sembilan) di antaranya merupakan pemasok asing.

Rincian profil pemasok Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

No.	Bidang Usaha Type of Business	Jumlah Vendor Number of Vendors
1.	Agen Perjalanan Travel Agent	18
2.	Asuransi Insurance	26
3.	ATK	8
4.	Barang Promosi Promotional Merchandise	20
5.	Cetakan Printing	70
6.	Cleaning Service	2
7.	Ekspedisi Expedition	26
8.	Garmen Garments	14
9.	Inventaris Kantor dan Rudin Office and Official Housing Inventory	4
10.	IT	179
11.	Jaringan Komunikasi Communication Network	4
12.	Jasa Lainnya	72
13.	Kartu Plastik	16

Pada 2016, Bank Mandiri juga telah melaksanakan 1 (satu) kali *vendor gathering* pada tanggal 16 November 2016

have the ability to manage and minimize their own environmental impact.

All suppliers must comply with Bank Mandiri Procurement Policy, which includes compliance with laws and regulations of the Indonesian Government and Bank Indonesia, especially in the appropriate treatment of human rights, and employment practices.

Bank Mandiri Supplier Assessment has been developed as a monitoring system to ensure the presence of transparency in the procurement process. Supplier Assessment presents an invaluable insight on areas where improvements are needed, including how Bank Mandiri can work more effectively with suppliers and create added value together.

At the end of 2016, Bank Mandiri recorded 995 suppliers were registered in the Strategic Procurement Group, which almost entirely were dominated by national suppliers. As for the foreign suppliers, Bank Mandiri was only partnering with IT based suppliers for IT related projects, while other ongoing projects were all carried out by national suppliers. As illustrated by the table below, out of 179 IT suppliers, 9 (nine) of which were foreign suppliers.

Bank Mandiri supplier profile details are as follows:

No.	Bidang Usaha Type of Business	Jumlah Vendor Number of Vendors
14.	Kendaraan Automotive	17
15.	Kendaraan(Penjualan) Automotive (Sales)	10
16.	Kendaraan(Sewa/Service) Automotive (Rental/Service)	13
17.	Konsultan Consultant	91
18.	Kontraktor Contractor	103
19.	Media Promosi Media Promotion	36
20.	Peralatan Kantor Office Supply	75
21.	Perangkat Keras Hardware	10
22.	Perangkat Lunak Software	18
23.	Perdagangan Umum Public Trading	79
24.	Periklanan Advertising	42
25.	Perlengkapan Kantor Office Equipment	20
26.	Tekstil Garments	22

In 2016, Bank Mandiri also conducted a 1 (one) time vendor gathering on November 16, 2016 with the



dengan agenda *sharing values* antara Bank Mandiri dengan vendor.

Selain itu, Bank Mandiri juga bekerja sama dengan para vendor yang menjadi rantai pasokan untuk menangani dampak negatif yang terjadi pada masyarakat akibat kegiatan operasional dan vendor. Di tahun 2016, Bank Mandiri belum melaksanakan *Human Rights Assessment*, namun evaluasi internal yang dilakukan pada menunjukkan tidak adanya dampak negatif signifikan pada masyarakat yang perlu penanganan khusus. Bank Mandiri juga tidak menerima sejumlah pengaduan sosial dan HAM yang signifikan dari masyarakat. Khusus terkait insiden dengan masyarakat adat di daerah, tidak terdapat pengaduan yang diterima sepanjang tahun 2016. [G4-HR9]

agenda of sharing values between Bank Mandiri with the vendors.

In addition, Bank Mandiri also worked with vendors in the supply chain to address the adverse impacts on society as a result of operational activities. However, Human Rights Assessment has not been implemented, but internal evaluation showed no significant adverse impact on the society requiring special handling. The Company did not receive significant social and human rights complaints from the public, especially with regards to the local community (indigenous people, no complaints were received during the year 2015. [G4-HR9]

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

Seiring dengan pelaksanaan Kode Etik Perusahaan, benturan kepentingan menjadi salah satu isu terpenting di dalam menjaga keharmonisan hubungan kemitraan Bank Mandiri baik dengan pihak internal maupun eksternal Bank Mandiri. Pada praktiknya, pengelolaan benturan kepentingan secara benar di dalam Bank Mandiri merupakan cerminan perilaku berintegritas Perusahaan, yang tentunya akan berpengaruh pada reputasi Bank Mandiri, dan pada akhirnya juga bisa menentukan keberlangsungan aktivitas bisnis Bank Mandiri dalam jangka panjang. Sebagai tindak lanjut, Bank Mandiri memiliki ketentuan yang mengatur praktik bisnis Bank Mandiri agar terhindar dari benturan kepentingan yang dituangkan dalam panduan *code of conduct* Bank Mandiri, yang isinya sebagai berikut:

1. Seluruh jajaran Bank Mandiri wajib menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Apabila satu dan lain hal tidak dapat dihindari, maka yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada atasan langsung.
2. Seluruh jajaran Bank Mandiri dilarang memberikan persetujuan dan/atau meminta persetujuan atas fasilitas kredit, serta tingkat bunga khusus maupun kekhususan lainnya untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan di mana ia dan/atau keluarganya mempunyai kepentingan.
3. Seluruh jajaran Bank Mandiri dilarang bekerja pada perusahaan lain baik sebagai Direksi, karyawan, konsultan atau anggota Komisaris, kecuali apabila telah mendapatkan penugasan atau izin tertulis dari Bank Mandiri. Khusus untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi, perangkapan jabatan harus mengikuti ketentuan regulator mengenai GCG.
4. Seluruh jajaran Bank Mandiri dilarang menjadi rekanan secara langsung maupun tidak langsung, baik rekanan untuk barang atau jasa bagi Bank Mandiri.

MANAGEMENT OF CONFLICTS OF INTEREST

Along with the implementation of the Code of Ethics, conflicts of interest has become one of the most important issues in maintaining harmony in the good partnerships between Bank Mandiri and internal and external parties. In practice, the proper management of conflicts of interest within Bank Mandiri is a reflection of integrity in the Company's behaviour, which will certainly affect the reputation of Bank Mandiri, and in the end could also determine the sustainability of Bank Mandiri business activities in the long term. As a follow up, Bank Mandiri has provisions that govern Bank Mandiri business practices in order to avoid conflicts of interest as outlined in the guide to the code of conduct of Bank Mandiri, the content is as follows :

1. The entire ranks of Bank Mandiri must avoid activities that may pose a conflict of interest. If for one reason or another this cannot be avoided, then those involved must report it to their direct supervisor.
2. The entire ranks of Bank Mandiri is prohibited from giving consent and/or request approval for credit facilities, as well as preferential rates and other special treatment for himself, his family, and where he and/or his family have interests.
3. The entire ranks of Bank Mandiri are prohibited from working in another company be it as Directors, employees, consultants or members of the Commissioners, unless the assignment comes from or have obtained written permission from Bank Mandiri. Exclusively for members of the Board of Commissioners and Board of Directors, dual positions must follow the regulatory provisions regarding GCG.
4. The entire ranks of Bank Mandiri are prohibited from partnering with the Bank directly or indirectly, be